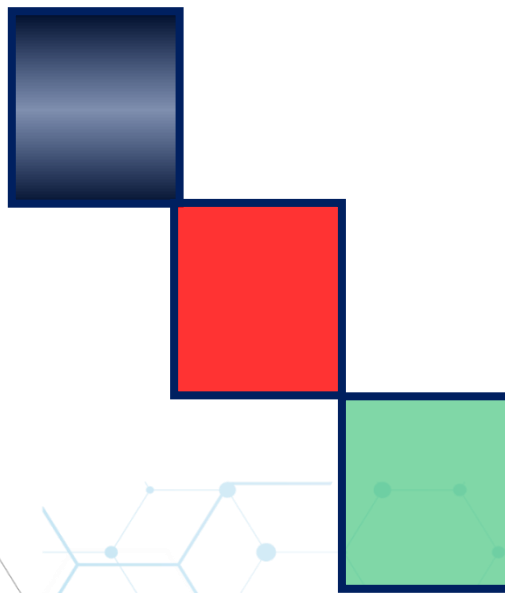




RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tim Perencana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Perubahan Permendagri atau pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RENSTRA SKPD yang bersifat indikatif. Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja dimasa mendatang. Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Malili, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP



MUHAMMAD SAFAAT DAENG PAREBBA, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB II	9
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	233
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	299
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III	40
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional.....	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	40
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV.....	46
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	46
BAB V.....	506
PENUTUP.....	566

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya	11
Tabel 2 Target Kinerja Renstra	24
Tabel 3 Reviu Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025	30
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	42
Tabel 5 Alokasi Pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu pemerintahan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya, karena tanpa perencanaan maka fungsi-fungsi lain (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak dapat berjalan.

Rencana kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana disebutkan bahwa penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD ke dalam rencana, program dan penganggaran

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur.

Renja SKPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra SKPD yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai pedoman penyusunan APBD.

Renja SKPD sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran tahunan yang dikumpulkan akan tersusun Renstra. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan Pemerintah. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Dalam Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Dalam Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk merumuskan kebijakan dan program strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Renja sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi, visi dan misi organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.024.747.444,- atau 92,66% dari total

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

anggaran sebesar Rp 12.977.880.605,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut

:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024
Diskominfo- SP Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	4.759.860.885		4.334.879.848		91,07
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	100%	111.684.305		106.550.220		95,4
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	2 Dokumen	48.239.450	2	47.957.600	100 99,42
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	10	2 Dokumen	3.214.450	2	3.112.450	100 96,83
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10	2 Dokumen	3.364.450	2	3.014.520	100 89,6

	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun	42	10 Dokumen	56.865.955	10	52.465.650	100	92,26
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	100%	3.081.440.740		2.980.514.130		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	137	22 Orang	2.976.009.74	22	2.905.038.250	100	97,62
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	90	12 Dokumen	105.431.000	12	75.475.880	100	71,59
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	100%	27.196.240	100	24.082.490	100	88,55
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	12	1 Dokumen	27.196.240	1	24.082.490	100	88,55
1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani (%)	100%	100%	190.394.650		74.003.998		38,87
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	18 Dokumen	41.414.650	18	30.607.850	100	73,91

	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimbingan teknis Impelementasi Peraturan Perundang Undangan	15	12 Orang	148.980.000	12	43.396.148	100	29,13
1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (%)	100%	100%	485.679.950		460.258.476		94,77
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	15	3	5.520.000	3	3.050.000	100	55,25
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25	2	9.183.950	2	7.171.270	100	78,08
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	10	2	7.050.000	2	6.799.500	100	96,45
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Udangan yang disediakan	300	4	2.640.000	4	2.640.000	100	100
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150	4	32.250.000	4	2.640.000	100	79,29
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	250	4	429.036.000	4	415.027.506	100	96,73

1.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	100%	398.815.000		269.170.000		67,49
	1	Pengadaan Kendaraan dinas Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1	4	111.270.000	4	111.270.000	100	100
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	16	3	16.000.000	3	4.500.000	100	28,13
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	16	18	270.000.000	18	153.400.000	100	56,81
	4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan	38	1	1.545.000	0	0	0	0
1.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	100%	100%	297.250.000		282.024.533		94,88
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan jasa surat menyurat yang diadministrasikan	550	4	5.650.000	4	4.314.750	100	76,37
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan	180	4	105.600.000	4	709.783	100	86,85
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum Kantor yang dibayarkan	85	4	186.000.000	4	186.000.000	100	100

1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	100%	167.400.000		138.276.001		82,6
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	112	9	66.380.000	9	50.686.001	100	76,36
	2	pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	163	9	81.020.000	9	67.605.000	100	83,44
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang terpelihara	10	2	20.000.000	2	19.985.000	100	99,93
2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100%	100%	4.290.470.920		4.041.017.550		94,19
2.1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat	100%	100%	4.290.470.920		4.041.017.550		94,19
	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dikelola	25	5 saluran	82.749.925	5 saluran	68.640.200	100	82,95

	2	Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID yang mengikuti sosialisasi	830	166 orang	149.480.250	166 orang	81.009.932	100	54,19
	3	Layanan Hubungan Media	jumlah mass media yang menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	130	30 media	4.015.257.450	30 media	3.861.482.778	100	96,17
	4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibentuk/dibina	355	71 kelompok	42.983.295	71 kelompok	29.884.640	100	69,53
3		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100%	100%	3.537.530.400		3.298.234.971		93,24
3.1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten luwu timur	100%	100%	2.712.509.900		2.515.534.525		92,74
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain dan sub domain yang dibina dalam pengelolaan konten website	195	41 OPD	51.776.000	41	38.769.100	100	74,88

	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	355	90 Titik	2.660.733.900	180 Titik	2.476.765.425	200	93,09
3.2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis egovernment yang dikelola	100%	100%	825.020.500		782.700.446		94,87
	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E Government yang dikembangkan	20	8 Aplikasi	645.428.400	10 Aplikasi	606.896.380	125	94,03
	2	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang mendukung program smart city luwu timur	156	11 Aplikasi	179.592.100	11 Aplikasi	175.804.066	100	97,89
II		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))	100%	100%	300.179.400		277.109.610		92,31

4.1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100%	100%	300.179.400		277.109.610		92,31
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data /informasi/ statistik sektoral daerah yang tersusun	1050	197 Buku	50.271.000	197 Buku	37.618.220	100	74,83
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah	250	1 Dokumen	249.908,400,00	1 Dokumen	239.491.390	100	95,83
III		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))	100%	100%	89.839.000		73.505.465		81,82
5.1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan	100%	100%	89.839.000		73.505.465		81,82
	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		140	41 Aplikasi	89.839.000	43 Aplikasi	73.505.465	105	81,82
Jumlah						12.977.880.605		12.024.747.444		92,66

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hasil analisa sebagai berikut:

➤ **Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dari tahun 2023-2024 teralisasi sebesar 100%. Pencapaian ini tak lepas dari komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja sehingga mengharuskan semua pegawai yang telah melakukan perjanjian kinerja untuk bekerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan. Adapun pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kan/Kota mempunyai 9 Kegiatan yang semuanya dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai upaya peningkatan nilai Lakip. Adapun 9 Kegiatan beserta capaian kerjanya Tahun 2024 adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian pada Tahun 2024 sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100%.
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ **Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mulai dilaksanakan dilaksanakan pada Tahun 2021 setelah berlakunya permendagri 90 tahun 2019. Program ini hanya memiliki 1 kegiatan sedangkan untuk sub kegiatan berjumlah 4 sub kegiatan, dimana dalam Program ini ada satu sub kegiatan yang didalamnya menangani publikasi berita daerah yakni sub kegiatan layanan hubungan media dengan target 30 media yang menjadi partner dalam menyebarkan informasi daerah.

Adapun realisasi kegiatan pada program ini pada tahun 2024 yakni:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 159% atau 14.789 informasi.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

➤ Program Aplikasi Informatika

Program ini adalah program yang masuk dalam KP 1 Dinas Kominfo SP Tahun 2021-2026 karena program ini yang mengakomodir penyediaan layanan internet di Ruang Publik, OPD, Puskesmas, BPP dan Rumah Jabatan . Selain itu, program ini juga mengakomodir penyediaan aplikasi dan website yang dikelola oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Dan pada tahun 2024 realisasi kinerja dari program ini sebesar 100%. Adapun rincian rencana dan realisasi capaian kinerja adalah OPD terkoneksi internet (target 41, terealisasi 41), Ruang Publik (target 21, terkoneksi internet 21), Puskesmas (target 11, realisasi 17), BPP (target 11 realisasi 11), Rumah Jabatan (target 16 realisasi 16), dan Aplikasi E-Government (target 8 realisasi 10).

➤ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini mempunyai 1 Kegiatan yakni kegiatan Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota daerah dan 2 sub kegiatan yakni sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Sasaran program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah data /informasi/statistik sektoral daerah, realisasi indikator sasaran program tahun 2024 sebanyak 197 Buku atau sebesar 100% dari target 197 Buku.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/dokumen yang

valid. Penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur sehingga diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah. Adapun lokus OPD yang ditargetkan menjadi pengguna data statistik daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah, Dinas KOMINFO-SP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.

➤ **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi ini telah terealisasi sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung sistem keamanan aplikasi/website dan perangkat server yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Target output kegiatan adalah Jumlah Sistem Elektronik (Aplikasi) yang diamankan dan terealisasi sebanyak 10 Sistem Elektronik (Aplikasi) atau (100%).

Adapun aplikasi yang di amankan adalah : Web site SIBEBAS, Pelayanan Terintegrasi, ekominfo surat, Kominfo Cloud, SITOMAS, Sigap Sarpras RSUD I Lagaligo, Sihemat, Sipatuh, Periksaki, Sentuh Hati Lutim, Siyanti, Website Pemkab Luwu Timur, JDIH, PPID, TITAH ABAH, SIJAKUNG, SIAGA BENCANA, SIMAMAT.

2.2. Analisis Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Diskominfo-SP Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Target Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Luwu Timur

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasioanl	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi	Catatan Anlisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	2.75	
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			85	87	88	90	92	88	
3	Nilai SAKIP			63	64	65	67	70	65	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). Penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dimana nilai atau indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah 3,16 dengan target awal adalah 2,75..

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "*(Nilai akhir dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan)*". Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dimana target nilai 88 dan realisasinya mencapai diangka 96,55 dengan predikat INFORMATIF. Dengan capaian tersebut Kabupaten Luwu Timur sukses mempertahankan predikat sebagai satu-satunya kabupaten INFORMATIF di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Selain itu dalam penyebaran informasi Pemerintah daerah juga dilakukan melalui saluran medsos, website warta lutim, PPID, Spam Laport dan Aplikasi Baruga. Jika melihat jumlah media yang menjadi parhtner dalam penyebaran informasi daerah pada Tahun 2024 memang cukup banyak mengingat target informasi daerah juga cukup besar sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo SP sepakat bekerjasama dengan media perthner. kerjasama ini dimaksudkan agar semua informasi Pemerintah Daerah dapat terpublikasi sampai kepada masyarakat yang berada di luar wilayah luwu timur.

c. Prestasi Nilai LAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Sakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 oleh Inspektorat diperoleh nilai skor 78,50 dengan peringkat BB dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

- Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja. Strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
- Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
- Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekarang beralih menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada dasarnya tidak mempengaruhi susunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian karena setelah dilakukan telaahan terhadap kedua nomenklatur tersebut, program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tidak

mengalami perubahan secara signifikan hanya saja ada beberapa program yang digabung menjadi satu program.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menghadapi sejumlah masalah antara lain :

1. Bidang TELEMATIKA

- Terbatasnya jumlah SDM yang menguasai teknis jaringan.
- Terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung pengembangan dan pemeliharaan jaringan yang ada di masing-masing OPD dan Ruang Publik.
- Tidak adanya kendaraan operasional untuk mengangkut alat video conference untuk kegiatan yang bersifat virtual.

2. Bidang APTIKA

- Terbatasnya SDM yang menguasai komunikasi dan informatika khususnya di bidang IT guna mendukung pembuatan dan pengelolaan aplikasi;
- Terbatasnya anggaran yang dilakokasikan untuk kegiatan Bidang APTIKA dan
- Terbatasnya alat alat pendukung pembuatan aplikasi yakni computer dengan spesifikasi yang tinggi.

3. Bidang IKP

- Terbatasnya anggaran yang dilakokasikan untuk kegiatan Bidang IKP;

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

- Penyebaran informasi pembangunan daerah melalui Medis Sosial belum maksimal karena kurangnya tenaga yang khusus menangani pengelolaan media sosial.
4. Urusan STATISTIK
- Masih kurangnya SDM terkait dengan pengelola data statistic dan design grafis data statistic;
 - Belum tersedia fasilitas pendukung atau penunjang untuk kegiatan Statistik;
 - Keterlambatan data dari beberapa OPD untuk diolah menjadi data statistic daerah dan ;
 - Belum maksimalnya penyelenggaraan walidata sektoral statistik pada tahun berjalan
 - Kurangnya Komunikasi antar OPD dalam permintaan data
5. Urusan PERSANDIAN
- Infrastruktur yang mendukung persandian dan keamanan informasi masih kurang;
 - Sumber daya manusia (SDM) di bidang persandian dan keamanan informasi masih kurang.
6. Bidang SEKRETARIAT
- Terbatasnya pegawai di bidang sekretariat; dan
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekretariat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Kominfo SP Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	4.086.971.565,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</i>	100%	4.381.275.565,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	119.480.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)</i>	100%	116.906.300,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	56.099.450,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	56.099.450,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.214.450,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.214.450,00	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.300.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.300.600,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7 Laporan	56.866.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	54.291.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	2.954.788.515,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.257.209.715,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 org/bulan	2.889.357.515,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/bulan	3.191.778.715,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	13 laporan	65.431.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan	65.431.000,00 persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar(%)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%	29.486.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar(%)</i>		32.666.800,00	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	29.486.900,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	26.953.900,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani (%)</i>	100%	75.937.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani (%)</i>		121.163.700,00	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 paket	45.700.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	8 Dokumen	33.243.700,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	8 Dokumen	33.243.700,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6 orang	42.694.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	6 Orang	42.694.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)</i>	100%	304.737.950,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)</i>		304.727.950,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 paket	5.520.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	5.520.000,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 paket	9.183.950,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	9.183.950,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 paket	6.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	6.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 dokumen	1.920.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1.920.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 laporan	31.250.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	4 Laporan	31.240.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 laporan	250.364.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	250.364.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi (%)</i>	100%	210.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi (%)</i>		207.500.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	9 Unit	21.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	9 Unit	21.000.000,00	

	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	27.000.000,00	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	27.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	159.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	156.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.500.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan</i>	100%	269.850.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan</i>	100	269.850.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	105.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	105.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	162.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	162.000.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</i>	100%	122.190.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</i>	100	122.190.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 unit	83.180.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	13 Unit	83.180.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 unit	19.010.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	19.010.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	20.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		<i>Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola</i>	100%	3.422.595.840,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		<i>Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola</i>		3.422.595.840,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<i>persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat</i>	100%	3.422.595.840,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<i>persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat</i>		3.422.595.840,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>	5 Media	82.749.850,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili,	<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>	5 Media	82.749.850,00	

							Puncuk Indah				
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	129.640.200,00	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	129.640.200,00	
	Relasi Media	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewanpers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	3.182.882.400,00	Relasi Media	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewanpers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	3.182.882.400,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 orang	27.323.390,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	4 orang	27.323.390,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100%	3.006.106.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah		3.006.106.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<i>persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten luwu timur</i>	100%	2.435.735.500,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<i>persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten luwu timur</i>		2.435.735.500,00	

	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	1 dokumen	2.435.735.500,00	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	1 Dokumen	2.435.735.500,00	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100%	570.370.500,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100%	570.370.500,00	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>	6 Aplikasi	570.370.500,00	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>	6 Aplikasi	570.370.500,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		<i>persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))</i>	100%	324.179.150,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		<i>persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))</i>		324.179.150,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100%	324.179.150,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		<i>persentase statistik sektoral yang diselenggarakan</i>		324.179.150,00	

	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	85 Persentase	249.908.150	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>	85 Persentase	249.908.150	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>	1 dokumen	74.271.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>	1 dokumen	74.271.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		<i>Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen(%))</i>	100%	90.039.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		<i>Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen(%))</i>		90.039.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan</i>	100%	90.039.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen(%))</i>		90.039.000,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	41 Perangkat Daerah	90.039.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	<i>persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan</i>	41 Perangkat Daerah	90.039.000,00	
J U M L A H						10.929.891.555,00				11.269.895.555,00	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2025 adalah dengan mengakomodir program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Kominfo SP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Dari hasil telaahan terhadap kebijakan nasional urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, ada 5 (lima) dari 9 (Sembilan) sasaran startegis Kemenkominfo yang masuk dalam rencana program kerja Dinas Kominfo untuk periode 2021-2026 yakni:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
3. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
4. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; dan
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Renja

Secara umum tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan, beserta indikator kinerja dan pagu infikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai akhir Tahun 2025 mendatang. Adapun Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu :

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

3.2.2. Sasaran Renja

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran Renja 2025 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik dan
3. Meningkatnya Nilai Sakip

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4
Tujuan dan sasaran Rencana kerja
Dinas komunikasi Informatika statistik dan Persandian

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,16
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,55
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip dinas Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip Kominfo	Nilai Sakip	78,75

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan antara lain :

a). Sasaran : Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatannya adalah:

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.** Adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan kegiatan:
 - **Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.** Adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor
 2. Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.** Adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b). Meningkatkan keterbukaan Informasi Publik

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan :
 - **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.** Adapun sub kegiatannya adalah:
 1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 2. Pelayanan Informasi Publik
 3. Relasi Media
 4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

c). Sasaran : Meningkatkan Nilai Sakip

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/semesteranSKPD
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyusunan perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan bahan logistik kantor
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 5. Fasilitasi kunjungan Tamu

6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan ;
Adapun sub kegiatannya adalah :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian direncanakan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Perubahan Rp **16.258.243.581,-**. Alokasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Alokasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan penunjang perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	7.624.670.741
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	92.109.250
I.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2.795.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			330.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.465.000
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.751.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			101.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			375.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.660.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			615.000
I.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	42.213.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			625.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.170.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.800.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			35.618.000
I.1.4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	44.349.650
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			382.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			747.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.351.650
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			9.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			32.868.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		3.241.320.841
I.2.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	12	50.801.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.769.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1.410.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.225.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			998.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			28.080.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.319.000
I.2.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	25	3.190.519.241
	Belanja Gaji Pokok PNS			1.233.373.967
	Belanja Gaji Pokok PPPK			354.932.332
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			130.888.310
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			29.534.219
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			99.701.750
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			61.258.100
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			31.975.625
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			22.137.448
	Belanja Tunjangan Beras PNS			79.401.809
	Belanja Tunjangan Beras PPPK			21.049.152
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			1.028.005
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			70.224
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			353.300
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			1.090.690.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			34.125.000
I.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100	62.095.100
I.3.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	23.093.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			778.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			544.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			988.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20.783.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

I.3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	39.002.000
	Belanja Bimbingan Teknis			29.002.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10.000.000
I.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100	476.091.150
I.4.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	6.190.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			6.190.000
I.4.2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi/dilayani	4	22.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			9.600.000
I.4.3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	2.640.000
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			2.640.000
I.4.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	4	429.880.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			429.880.000
I.4.5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	3	5.520.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			5.520.000
I.4.6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	9.461.150
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			6.120.400
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			3.340.750
I.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan	100	3.303.300.000
I.5.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	109.000.000
	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat			14.000.000
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			35.000.000
	Belanja Modal Mebel			60.000.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

I.5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	48	3.194.300.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			2.685.300.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone			92.000.000
	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF			6.000.000
	Belanja Modal Personal Computer			315.000.000
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			25.000.000
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			62.000.000
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer			9.000.000
I.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	178.401.100
I.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	114.641.100
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			22.661.100
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			91.980.000
I.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	29.760.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			7.500.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			3.660.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			14.600.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			4.000.000
I.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2	34.000.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			34.000.000
I.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibayarkan	100	245.850.000
I.7.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	105.600.000
	Belanja Tagihan Air			3.600.000
	Belanja Tagihan Listrik			102.000.000
I.7.2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2.250.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			230.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.020.000
I.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	138.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			48.000.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			26.250.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			42.000.000
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja(PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Opsional			3.750.000
	Belanja Jasa Tenaga Supir			18.000.000
I.8.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadminist rasi sesuai standar (%)	100	25.503.300
I.8.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	25.503.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			208.300
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			720.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			790.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			3.025.000
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan			12.600.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			8.160.000
II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100	4.330.748.640
II.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan persentase jumlah pengurus KIM yang renposif gender	100	4.330.748.640
II.1.1.	Relasi Media (42)	Jumlah Aktivitas Relasi Media	12	4.175.376.600
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			-
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			3.200.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			940.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			5.520.150
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			345.456.450
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			10.110.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.080.000
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			35.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			18.000.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

	Belanja Jasa Tenaga Ahli			192.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			439.050.000
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			2.296.000.000
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			91.260.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			31.200.000
	Belanja Bimbingan Teknis			272.000.000
	Belanja sewa Aset tidak Berwujud-Software			13.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			414.560.000
II.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	10	60.058.750
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			437.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1.808.750
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.590.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.060.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6.280.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			12.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			36.883.000
II.1.3.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5	54.251.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			342.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.050.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			111.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			6.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			15.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.628.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.000.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			1.120.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.000.000
	Belanja Sewa Hotel			1.000.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

II.1.4.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	4	41.061.790
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			326.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1.486.790
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.085.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.826.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			15.718.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			1.120.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.000.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			1.500.000
	Belanja Sewa Hotel			1.000.000
III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika Pemerintahan daerah	100	4.109.848.100
III.1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain dan koneksi Jaringan Internet OPD Sekabupaten Luwu Timur	100	3.514.023.600
III.1.1.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintha Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	3.514.023.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			908.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			899.700
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			112.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			34.806.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			15.000.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			3.255.000.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan			50.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			46.297.000
	Belanja Modal Peralatan Jaringan			105.000.000
	Belanja sewa Aset tidak Berwujud-Software			6.000.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

III.2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pemerintahan berbasis E Government yang dikelola	100	595.824.500
III.2.1.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	4	595.824.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			946.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			2.552.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.125.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			321.700.000
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software			100.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			130.701.000
	Belanja Aset tidak berwujud-Losensi dan Franchise			30.000.000
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	157.092.000
IV.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase data statistik sektoral kabupaten yang tersusun	100%	157.092.000
IV.1.1.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	85%	87.037.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.139.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			2.011.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			5.443.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.035.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			18.900.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			8.650.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			-
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40.859.000
IV.1.2.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1	70.055.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			512.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			588.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			29.850.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			125.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			18.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19.780.000

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100	35.884.100
V.1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100	35.884.100
V.1.1.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	41	35.884.100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			350.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			251.200
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.068.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			444.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			31.370.000
	TOTAL BELANJA			16.258.243.581

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dimana Renja Tahun 2025 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran.